

MODEL PENANGGULANGAN BENCANA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DALAM PERSPEKTIF POLITIK EKOLOGI

ANWAR SARAGIH

Abstrac

One of the most worrying issues in the 21st century, in addition to the economic crisis and political crisis is the environmental crisis. Because the impact of environmental damage could result in catastrophic disasters such as smoke, landslides, flooding to the disaster smoke. Langkat district of North Sumatra has clearly felt the impact of forest destruction in the area of Gunung Leuser National Park. Where in the past 12 years since the 2003-2015 experience regular flooding. Especially flash floods that hit Langkat particularly Bahorok subdistrict Subdistrict Besitang 2003 and 2006. For many years flood in Langkat had not yet found a model appropriate measures in addressing floods in langkat. Berbagai policy, regulation and the model has not been able to alleviate problems in the Gunung Leuser National Park in particular Illegal logging, forest perampahan and land conversion. This study aims to find the right model Countermeasures in dealing with disasters in langkat deforestation in the area of Gunung Leuser National Park with the perspective of Political Ecology. This study also examines the major trouble spots in the last 12 years why not also found the model appropriate measures in disaster management in the area of Gunung Leuser National Park. This study is a qualitative research by using a critical paradigm, and this research is a Model Scheme for Disaster Management in the Region Gunung Leuser National Park in the Perspective of Political Ecology.

A. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat dalam beberapa tahun terakhir dilanda banjir bandang. Sejak tahun 2003 hampir setiap tahun air masih menggenangi pemukiman penduduk, kantor-kantor pemerintahan dan daerah pertanian. Namun, banjir terparah terjadi tahun 2003, 2006, 2013, 2014 dan 2015. Artinya sudah 5 kali banjir bandang terjadi di Kabupaten Langkat.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (BPBD Kabupaten Langkat) kerugian yang disebabkan Banjir tersebut sangat signifikan. Dimulai dari banjir *pertama*, terjadi pada November 2003 menyebabkan 300 orang meninggal dan hampir 400 bangunan hancur. *Kedua*, banjir yang terjadi pada Desember 2006 menyebabkan sekitar 11.000 hektar lahan pertanian rusak, 17.000 warga mengungsi dan 6 warga meninggal dunia. *Ketiga*, Banjir yang terjadi pada Oktober 2013 mengakibatkan sekitar 3.530 rumah penduduk tergenang oleh air. *Keempat*, Banjir yang terjadi pada September 2014 menyebabkan 5 kecamatan tergenang setinggi 100 cm dan 1.976 rumah tergenang air. Dan *kelima*, terjadi pada Januari 2015 terjadi banjir di Langkat setinggi 50-70 cm yang mengakibatkan 5.293 rumah tergenang air dan 1 orang meninggal dunia. (Harian Analisa Medan, 22 April 2014)

Selama ini penanggulangan bencana banjir di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) masih ditangani pemerintah provinsi Sumatera Utara

melalui Perda Provinsi Sumatera Utara No 8 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Penanganannya juga masih sebatas pada kebijakan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dimaksud seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum dan pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara penanganan terkait rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara terkait pengaturan mengenai standard konstruksi bangunan. (Tribun Medan, 14 oktober 2015)

Kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi bencana banjir di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) selama ini terbukti tidak efektif terutama dalam hal pencegahan dan tanggap darurat bencana. Sebab, awalnya titik banjir di kabupaten Langkat hanya di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Besitang. Namun, kondisi saat ini malah semakin parah. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dalam 3 tahun terakhir titik banjir meluas menjadi 12 kecamatan. Ke-12 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Hinai, Kecamatan Tanjung pura, Kecamatan Batang serangan, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Secangkang, Kecamatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kecamatan Serapit, Kecamatan Salapian, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Besitang dan Kecamatan Gebang.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan model penanggulangan bencana yang diambil dibanyak negara yang memiliki pendekatan yang sistematis dari pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Misalnya penanganan bencana banjir kota Rio de Janeiro (Brazil) tahun 2010 yang menewaskan 95 orang, mengungsikan 35.000 orang dan kerusakan 10.000 rumah. Pada awalnya wilayah kota Rio de Janeiro menggenangi 9 kecamatan dalam 2 tahun berikutnya (2012) berkurang menjadi 7 kecamatan. Pencegahan yang dilakukan pemerintah provinsi di Rio de Janeiro dengan penelusuran tanggul (*walk through*) dengan cara menyiapkan kantung pasir sebagai serapan air. penanganan tanggap bencana melalui penggunaan Citra Landsat pada Sistem Informasi Geografis (SIG) di kawasan Hutan, Daerah aliran Sungai (DAS) dan kota. Serta penanganan pasca bencana dengan relokasi rumah-rumah warga. (Guimaraes : 2014)

Semakin parahnya titik banjir di Kabupaten Langkat tidak lepas dari pengaruh rusaknya ekosistem hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sebagai salah satu hutan konservasi, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan Taman Nasional tertua di Indonesia yang luasnya mencapai 1.094.692 hektar yang meliputi wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedikitnya terdapat 3.500 spesies tumbuhan yang hidup di berbagai habitat di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Secara Teritorial luas hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di kabupaten Langkat mencapai 300.000 hektar. Namun, kondisinya saat ini sekitar 1/5 bagian hutan di kawasan tersebut mengalami kerusakan parah. Sebanyak 42.000 hektar hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Langkat mengalami deforestasi akibat penebangan liar, perambahan hutan dan alih fungsi lahan. Tercatat kawasan TNGL khususnya daerah Kawasan Besitang Kabupaten Langkat dalam 10 tahun terakhir telah kehilangan 30.000 hektar hutan akibat ilegal logging dan alih fungsi lahan. Setiap

hari kawasan TNGL setidaknya kehilangan hutan rata-rata 2-3 hektar. (BBTNGL : 2011)

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Sementara, hal tersebut tidak diimbangi oleh penyerapan air oleh pepohonan yang seimbang. Sedimentasi dan erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Langkat juga tinggi, untuk itu peranan hutan sebagai pengatur keseimbangan air sangat penting. Disamping dapat menyerap dan menyimpan air pada musim hujan, juga dapat melepaskannya pada musim kemarau. Hubungan hidrologi antara atmosfer dan tubuh air bumi dapat berjalan secara langsung atau lewat peranan DAS. Terjadi pula hubungan hidrologi langsung antara DAS dan atmosfer. (Notohadiprawiro, 2014 : 23)

Efek dari penebangan hutan secara tak beraturan tersebut terlihat dari belasan ribu hektar DAS di kawasan kabupaten Langkat mengalami rusak parah. Akibatnya erosi dan longsor terus terjadi. Tercatat 14.323,71 hektar DAS di kabupaten langkat mengalami kerusakan dan masuk zona kritis. Angka itu setara dengan 14,51% dari total luas DAS di kabupaten Langkat yang jumlahnya mencapai 98.701, 58 hektar. (Kompas, 19 april 2014)

Dalam kajian ekologi politik, Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem kerana hubungan antara masyarakat terutama hutan terbentuk dari kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan memiliki kemanfaatan ganda yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung lebih kepada pemanfaatan hutan dari prespektif ekonomis seperti kemampuan hutan untuk menyediakan produk-produk hasil hutan seperti kayu, rotan, getah dan obat-obatan. Sementara manfaat tidak langsung lebih kepada pemanfaatan hutan dari prespektif lingkungan dimana hal ini dasari kemampuan hutan sebagai pengatur tata air, pelindung plasma nutfah, pencegah banjir, konservasi tanah dan menjaga keseimbangan kandungan oksigen dan karbondioksida di udara. (Arif, 2001 :11)

Illegal logging yang terjadi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menyebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang berimbas pada banjir di Kabupaten Langkat. Lebih lanjut banjir tahunan menyebabkan masyarakat mengalami kendala rutin yaitu perbaikan sarana dan prasarana. perubahan kondisi ekologi akibat *illegal logging* berdampak pada kondisi masyarakat di kabupaten Langkat secara psikologi, sosial dan politik. Setelah rusaknya hutan Taman Nasional Gunung Leuser. (Lumbangaol : 2005)

Para aktor atau pelaku-pelaku ekonomi di dasarkan pada keuntungan ekonom. sehingga selalu melakukan pengkalkulasian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas praktek operasional ekonomi, baik itu pada tahap produksi, distribusi maupun pada tahap konsumsi. Di banyak negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia terjadi suatu kerjasama antara para politisi, birokrat dan pengusaha yang telah memperburuk kondisi ekologi bumi. Kegagalan dalam sistem tata pengaturan pemanfaatan sumberdaya hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan ketidakseimbangan dalam proses-proses pertukaran dalam sistem ekologi, maka Keseluruhan hutan

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) akan mengalami gangguan berupa rusaknya DAS dan erosi yang mengakibatkan banjir.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam 12 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi banjir yang terjadi di Kabupaten Langkat. Mulai dari membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tahun 2009. Namun, Permasalahan bencana banjir yang dialami Kabupaten Langkat dalam 12 tahun terakhir ini sangat kompleks. Karena, aktor penyebabnya melibatkan banyak aktor. Mulai dari negara, pemerintah daerah, pengusaha, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal di Kabupaten Langkat. Untuk itu penelitian ini mencoba mencari Model Penanggulangan yang tepat dalam menanggulangi bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

A.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mencoba Dengan metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara *deep interview*. Kemudian, melalui strategi *eksploratoris sekuensial* menurut Creswell (2010:22-23), peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini juga menggunakan Paradima Kritis untuk mendesain model penanggulangan yang tepat dalam menanggulangi bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

B. PEMBAHASAN

B.1. Penguatan Peran Stakeholder

Dalam bukunya Raymod L Bryant dan Sinead Bailed (1997) yang berjudul *Third Worl Politic Ecology*. Para aktor atau stakeholders yang terlibat dan berperan besar dalam kerusakan lingkungan adalah Negara (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, Pengusaha, lembaga Sosial masyarakat dan Masyarakat. Penguatan peran para *stakeholder* ini sangat penting dalam menanggulangi bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Selama ini.

Peranan stakholders (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan taman nasional atau dunia usaha sungguh di butuhkan. Kerjasama pemangku kepentingan itu juga dibutuhkan oleh pengelola taman nasional di Indonesia pada umumnya dan Taman Nasional Gunung Leuser pada khususnya.

Dalam era orde baru, peranan pemerintah sangat dominan, dimana peranan negara (*state*) sungguh tampak dan terasa diberbagai bidang usaha. Peranan tersebut berisifat sentralistik itu dinamakan sentral stakeholder. Peran single stakeholder kini digantikan oleh multi-stakeholder. Dalam konsep multistakholder ini terdapat 9 elemen penting yang harus mengikuti prinsip *good govermance*, masing-masing : parsitipasi, aturan hukum, transparansi, tanggap (*responiveness*) orientasi konsensus, keadilan

(*equity*), daya guna dan hasil guna, akuntabel dan memiliki visi strategik (Lawang, 2005 : 239-240)

Menurut Bapak Pindi Patana yang mengatakan bahwa :

“Para pemangku kepentingan yang dapat juga di sebut sebagai sebuah stakeholder memiliki kewenangan yang sangat vital dalam pengelolaan Taman Nasional termasuk Leuser. Jika para pemangku kepentingannya tidak serius mengurus hutan, maka dampak ekologisnya sangat kuat. Tidak hanya itu kerugian akibat itu bisa terjadi bencana. Dijaman pak Harto semua dikelola oleh pemerintah saat itu keadilan mengenai pengelolaan hutan ditangani sepenuhnya pemerintah pusat” (Patana, Wawancara 3 September 2015)

Stakeholder yang memfokuskan para aktor movement (pergerakan perilaku) baik yang sifatnya direct actor (pelaku langsung) misalnya pemerintah pusat dan kementerian kehutanan (dirjen PHKA), pemerintah provinsi (Dinas kehutanan Provinsi), Pemerintah daerah (Dinas Kehutanan kabupaten). Sebaliknya peran indirect actors (pelaku tidak langsung) misalnya aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik lokal maupun internasional, akademisi, lembaga donor, swasta dan masyarakat lokal sendiri dalam turut serta menjaga dan melestarikan Taman Nasional.

B.2. Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi

Konsep pengelolaan kemitraan atau collaborative management yang mengundang multistakeholders sangat populer digunakan pada rezim reformasi ini. Namun, sebenarnya diakhir pemerintahan orde baru yakni tahun 1990-an, konsep pengelolaan kemitraan ini sudah banyak diimplementasikan dilapangan dalam pengelolaan sektor kehutanan, khususnya kerja sama Balai taman Nasional dan Stakeholder lain. Atau dengan kata yang lain, dulu ketika Orde Baru, pengelolaan sifatnya sentralistik dikenal dengan pengelolaan berbasis pemerintah (*statebase managemen*). (Hidayat, 2011 : 268).

Dengan demikian perubahan paradigma tersebut menunjukkan satu upaya mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan yang dilindungi seperti taman nasional, untuk mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan yang dikemukakan pemerintah karena pemerintah pusat mempunyai keterbatasan dalam alokasi anggaran, sumber daya manusia dan minimnya pengawasan riil dilapangan, sehingga keikutsertaan berbagai stakeholders dalam pengelolaan taman nasional, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, LSM, dan masyarakat sangat penting

Pemahaman stakeholder atau aktor pemangku kepentingan mengenai diskursus eksistensi dan taman nasional. Para aktor stakeholder mempunyai peran sentral dalam melaksanakan co-management (kerjasama pengelolaan taman nasional). Misalnya peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemberian dana untuk pengembangan *World Bank* dan *Foundation*, LSM baik internasional atau domestik maupun masyarakat belum menjadi isu kebijakan pemerintah daerah (Pemda). Padahal, ada

beberapa pemerintahan kabupaten yang setengah bahkan lebih alokasi lahan dipakai untuk lahan konservasi nasional. Misalnya Taman Nasional Gunung leuser (TNGL)

Dalam kaitan diskursus mengenai taman nasional, diharapkan para aktor pemegang kepentingan tersebut memberikan pandangan atau gagasan, solusi dan rekomendasi mengenai peran strategis taman nasional yang berfungsi sebagai perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Sebaliknya, kerusakan taman nasional dan berbagai implikasinya sebagai bentuk pengelolaan yang *miss-management* (salah pengelolaan) oleh kementerian kehutanan (pemerintah pusat), Dirjen Perlindungan hutan dan Konservasi alam.

Menurut Bapak Pindi Patana yang mengatakan

“Pengelolaan secara bersama-sama adalah sebuah keniscayaan management. Ini karena berpangkal pada keterbatasan anggaran dan biaya (budgeting), sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan taman nasional. Disisi yang lain pemerintah pusat mempunyai kepentingan diri yang besar dan tidak mendistribusikan pembagian kewenangan untuk mengelola TNGL dengan stakeholder yang lainnya” (Patana, wawancara 3 september 2015)

Dalam mendorong *Collaborative Management Stakeholders*, Menteri kehutanan mengeluarkan peraturan No.P.19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Taman Nasional Gunung leuser (TNGL).

B.3. Konservasi Lingkungan

Kawasan Hutan merupakan salah satu sumber daya alam. hal ini karena hutan dapat memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia untuk di produksi dan di konsumsi. Para ekonom mengkategorikan hutan sebagai sumber daya terbarui (*renewable*). Namun, Hutan memiliki daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas, sehingga selama eksploitasi dan permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya hutan dapat digunakan secara lestari. Sebaliknya, jika eksploitasi sumber daya alam secara intensif dilakukan, dapat mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan dapat mengganggu. (Soemarwoto, 2001 : 59)

Sebagai sumber daya, kawasan hutanpun sering menjadi modal yang dapat dimanfaatkan guna membiayai pembangunan sebuah negara, seperti yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa orde baru. Taman nasional berfungsi untuk pengadaan udara bersih, daerah tangkapan air, keanekaragaman hayati dan keindahan pemandangan alam. Sumber daya lingkungan itu memberi jasa yang berharga bagi manusia seperti pengaturan iklim, dukungan terhadap species yang ekonomis penting dan pembentukan tanah. Jasa lingkungan yang seperti ini memiliki harga yang pasti (McNeely, 1992 : 2). Fungsi ekosistem yang dihasilkan kawasan hutan, termasuk Taman Nasional itu adalah sumber daya ekonomi tidak langsung yang sering kita sebut dengan “jasa Lingkungan”.

Menurut bapak Marsius Nainggolan :

“Cara yang dilakukan untuk menghindari kegiatan eksploitasi baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern dalam kawasan hutan adalah dengan menetapkan suatu kawasan daerah konservasi. Konservasi tidak berarti bahwa kawasan tidak digunakan sama sekali, tetapi pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu model pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah TNGL dijadikan sebagai konservasi yang murni tanpa eksploitasi”(Nainggolan, wawancara 13 agustus 2015)

Pemerintah mengenai Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara (BLH Sumut) bertugas mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan di Sumatera Utara. Termasuk mengenai kerusakan di TNGL.

B.4. Pencegahan Ilegal Logging Melalui Pemanfaatan Teknologi

Kepemilikan hutan (*forest tenure*) merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan kepemilikan, sewa menyewa (*tenancy*), pengelolaan dan tata guna hutan (Food and Agriculture Organisation, 2013).

“It is a combination of legally or customarily defined forest ownership and of rights and arrangements to manage and use forest resources. Forest tenure determines who can use what resources, for how long and under what conditions.” (Food and Agriculture Organization, 2013).

Selama ini, kepemilikan hutan di Indonesia dibagi berdasarkan fungsi hutan. Indonesia membagi hutan berdasarkan fungsi hutan produksi, lindung dan konservasi. Hutan lindung dan konservasi pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat atau daerah. Taman nasional adalah salah satu hutan konservasi yang bertujuan melindungi keragaman hayati. Indonesia memiliki hutan tropis yang kaya akan beragam jenis satwa dan tanaman. Jenis keragaman hayati ini memiliki nilai tinggi dan dilindungi sebagai taman nasional.

Berdasarkan Statistik Kehutanan tahun 2011, terdapat 43 taman nasional (daratan) dengan luas 12.38 juta hektar, sedangkan taman nasional lautan berjumlah 7 unit dengan luas 4.04 juta hektar. Pengelolaan kawasan konservasi ini ada di Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Taman nasional umumnya berbatasan dengan tempat tinggal penduduk yang hidup di sekitar hutan dimaksud. Tiap-tiap taman nasional memiliki sejarah penunjukkan masing-masing.

Penunjukan hutan sebagai kawasan konservasi menimbulkan terbatasnya akses masyarakat sekitar terhadap hutan. Hal ini kadang menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti konflik antar pemerintah dengan masyarakat. Di taman nasional sendiri, kita masih sering mendengar adanya pencurian kayu, perburuan liar, perambahan hutan, desa di dalam hutan, kegiatan liar perusahaan pembalakan. Kegiatan ilegal logging terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kegiatan ilegal logging tersebut dapat menggambarkan beberapa kelompok masyarakat masih mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tempat

tinggal. Di antara mereka ada juga yang telah tinggal di dalam kawasan hutan sebelum dideklarasikan sebagai taman nasional. (Ismatul hakim, 2014 : 379-381)

Pengawasan ilegal logging di TNGL selama ini memang sudah dilakukan secara maksimal dengan pengawasan Polisi Hutan, Penangkapan di tempat sampai menindak secara hukum para pelaku ilegal logging. Namun, hal ini belum mampu mengurangi secara drastis para pelaku ilegal logging karena keterbatasan personil pengawas dan luas hutan di Taman Nasional Gunung leuser lebih dari 1 juta Ha. Penggunaan teknologi merupakan salah satu solusi dalam mencegah tindakan tersebut.

B.5. Bergabung di Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)

Ketika hutan tropis hancur dan deforestasi terjadi, kita akan kehilangan penyerap karbon dalam jumlah besar. Penebangan pohon atau kebakaran hutan dan gambut melepaskan karbondioksida (CO₂) dan Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Hutan di bumi kita menghilang dengan kecepatan tinggi, sekitar 130.000 km² setiap tahunnya atau seluas negara Inggris. Hilangnya hutan seluas itu menimbulkan emisi karbon yang sangat besar yaitu sekitar seperlima dari emisi karbon seluruh bumi. Secara global tercatat sekitar 5,3 milyar ton karbon di lepaskan pertahunnya akibat perubahan tata guna lahan (hutan dan gambut) dan kerusakan hutan. Emisi yang bersumber dari deforestasi kurang lebih sama dengan emisi sektor transportasi yang berasal dari sekitar 6.000.000.000 mobil, 400.000.000 sepeda motor, ratusan ribu pesawat dan kapal laut di dunia. (Agus Purnomo, 2010 : 3)

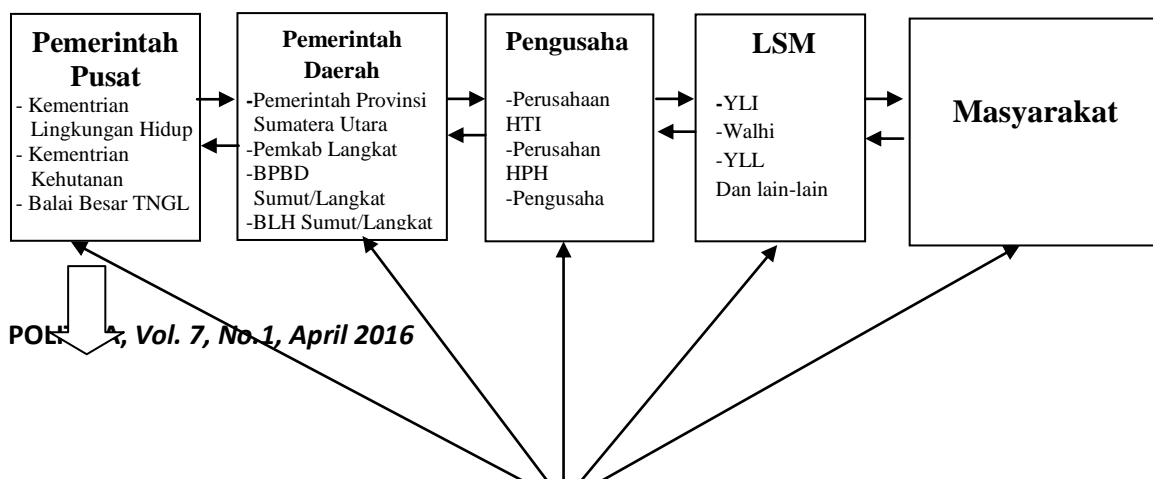
Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang emisi GRK dari sektor deforestasi dan degradasi hutan. Emisi GRK Indonesia ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan drainase lahan gambut dengan emisi tahunan tidak kurang dari 0,5 milyar ton karbon. Sebagai negara yang dituding dengan tingkat laju deforestasi terbesar ke-2 setelah Brazil, kementerian Kehutanan mencatat laju deforestasi Indonesia berkisar 1,17 juta Ha/tahun pada dua dekade sejak 1990-2010. Laju deforestasi itu meliputi Deforestasi didalam kawasan hutan sebesar 0,76 Hektar/tahun (64,8%) dan 0,41 juta hektar/tahun (35,5%) diluar kawasan hutan (areal pengguna)

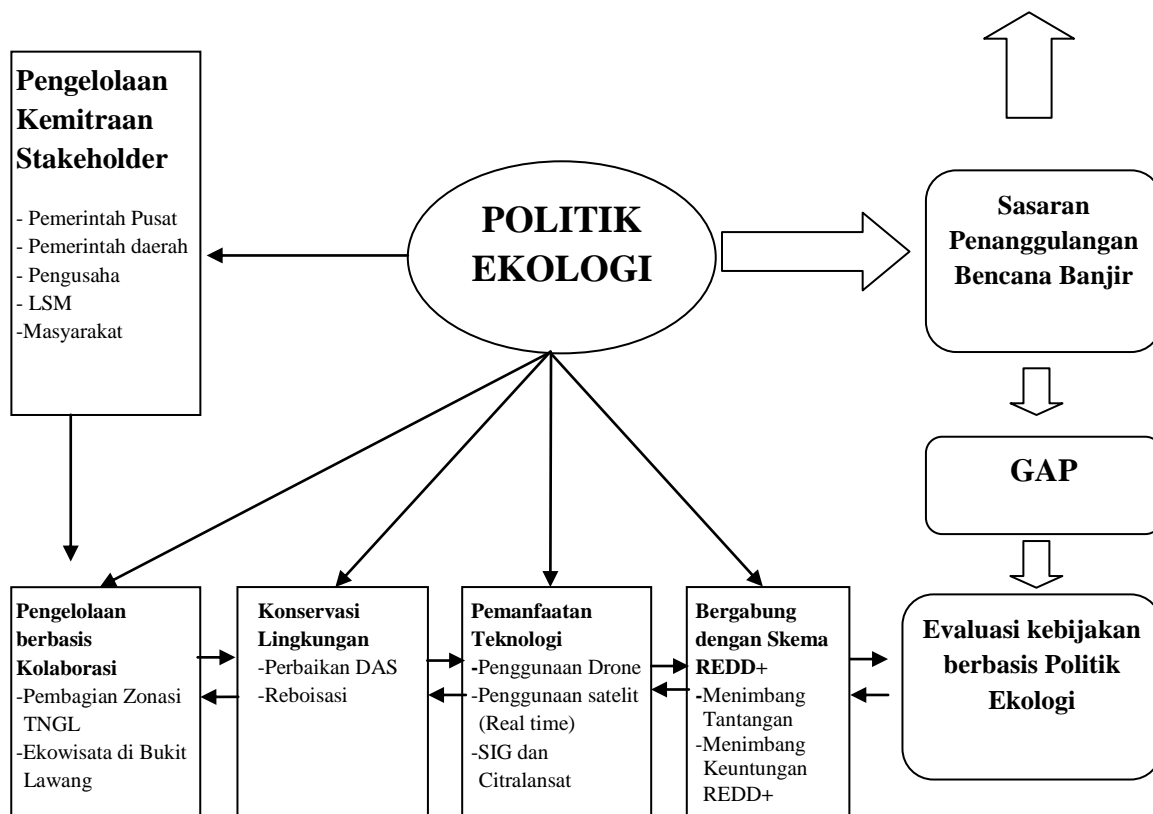
Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh alih fungsi lahan dan gambut serta kebakaran dan pembalakan liar. Lemahnya pengawasan terhadap penerapan aturan penebangan pohon dan kewajiban penanaman kembali oleh pemilih konsensi HPH, merajelalanya pembalakan liar dan diterbitkannya berbagai izin konversi hutan oleh kementerian Kehutanan dan pemerintah kabupaten merupakan hal-hal yang telah mewarnai kerusakan hutan di Indonesia.

Sumber emisi karbon paling besar ditemukan pada lahan gambut yang diubah menjadi lahan pertanian, seperti lahan kelapa sawit. Meskipun biayanya dan tenaga untuk mengembangkan lahan gambut relatif mahal dan produktifitas kebunnya juga rendah dibandingkan dengan kebun sawit lahan mineral, tingginya harga minyak kelapa sawit dipasar Internasional membuat sejumlah lahan gambut diareal pengguna lain (APL)

dimanfaatkan sebagai kebun baru kelapa sawit. Sumber lain keterlambatan sebagian industri kertas dan bubur kayu dalam pengembangan HTI (Hutan tanaman Industri) sehingga sebagian besar industri tersebut masih menggunakan bahan baku kayu dari hutan alami. Kerusakan hutan di Indonesia khususnya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) bukan hanya menyebabkan bertambahnya emisi karbon tetapi juga menimbulkan ancaman kelangsungan satwa langka seperti Harimau, Gajah, Orangutan dan badak serta satwa langka lainnya.

Skema Model Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dalam Perspektif Politik Ekologi





C. KESIMPULAN

Politik Ekologi pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan politik yang terkait dengan penyelesaian permasalahan lingkungan akibat kerusakan ekologi. Permasalahan Lingkungan tersebut tidak lepas dari para pemangku kepentingan yang berada di kawasan tersebut seperti Negara (Pemerintah pusat), Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten), Pengusaha, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Masyarakat.

Permasalahan ekologi tersebut tidak lepas dari Pemahaman manusia yang selama ini sangat antroposentris. Tidak pernah ada batasan yang jelas bagaimana titik keseimbangan antara alam dan manusia. Salah satu permasalahan lingkungan selama ini dimanapun itu adalah tidak ada titik temu antara antroposentrisme dan ekoposentrisme. Akibatnya kerusakan hutan selama bertahun-tahun tidak dapat dihindari.

Dampaknya tidak hanya terhadap ekologi itu sendiri tetapi juga makhluk yang mendiaminya misalnya hewan-hewan yang hidup di hutan. Jauh daripada itu kerusakan hutan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Bencana banjir bandang di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera utara dalam 13 tahun terakhir tidak dapat dihindari. Sudah ratusan masyarakat yang meninggal, ribuan bangunan yang hancur dan berbagai kerusakan yang mengakibatkan pemiskinan karena banjir di kawasan TNGL. Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah model penanggulangan bencana di kawasan tersebut dengan prespektif Politik Ekologi

Berdasarkan uraian-uraian, hasil analisis diatas, didapatkan beberapa pemikiran sebagai simpulan dari penelitian sebagai berikut: Kebijakan Politik Ekologi tidak lepas dari peran stakeholder jadi model penanggulangan bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak hanya bersifat *Topdown* (dari atas kebawah) dibutuhkan kordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, LSM dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan yang terkait masalah penanggulangan bencana berbasis politik ekologi bisa dilaksanakan secepatnya.

Model penanggulangan bencana yang selama ini yang hanya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara terbukti tidak efektif dalam menanggulangi bencana rutin di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perlunya sebuah Model penanggulangan bencana baru yang berbasis kepada politik ekologi dalam mengatasi bencana banjir di kabupaten langkat sumatera Utara.

D. DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Arif, Arifin ,2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta : Penerbit Kaninsius.

Chottob, Iskadir dan Iman Suhardjo, 2000, *Dari Sentralisasi ke otonomi*, Jakarta : DPRD-DKI Jakarta.

Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Hakim, Ismatul dkk, 2014, *Hutan Untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan* Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, jakarta : Penerbit Djambatan.

Purnomo, Agus,2012,*Menjaga Hutan Kita Pro-Kontra Kebijakan Moratorium hutan Gambut*, Jakarta : gramedia Pustaka.

Penelitian/Jurnal :

Charles H Lumban Gaol, *Kajian Hukum Lingkungan terhadap aktivitas Penebangan Hutan secara liar (Illegal logging) di Taman Nasional Gunung Leuser Provinsi Sumatera Utara) tahun 2005*, Medan : Universitas Sumatera Utara

Raphael Mendonca Guimaraes, Temporal analysis of the relationship leptospirosis and the occurrence of flooding due to rainfall in the city of Rio de Janerio, Brazil 2007-2012, DOI: 10.1590/1413-81232014199.06432014, artico Jurnal, hal.3683-3691

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Pindi Patana, S.Hut.,M.Sc, (Dosen Ilmu kehutanan Universitas Sumatera Utara) Medan, 3 September 2015

Wawancara dengan Bapak Marsius Nainggolan (Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara) Medan, 13 Agustus 2015.

Media :

POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016

Harian Analisa Medan tanggal Selasa, 22 april 2015

<http://analysadaily.com/opini/news/kerusakan-hutan-dan-potensi-tenggelmnya-langkat/171452/2015/09/17> diunduh tanggal 26 oktober 2015.